



**Manajemen Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Produktivitas BUMDes di Desa Balongsari Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang**

**Widya Indah Pradani<sup>1</sup>, Eka Yulyana<sup>2</sup>, Evi Priyanti<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang

<sup>2,3</sup>Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: [1810631180149@student.unsika.ac.id](mailto:1810631180149@student.unsika.ac.id), HP. 0895169869650

---

**Info Artikel**

Sejarah Artikel:

Diterima: 29 Maret 2022

Direvisi: 6 April 2022

Dipublikasikan: April 2022

e-ISSN: 2089-5364

p-ISSN: 2622-8327

DOI: 10.5281/zenodo.6468993

---

**Abstract:**

*Village Owned Enterprises or BUMDes are village-owned enterprises formed with the aim of improving the local village economy. Based on the research result, BUMDes in Balongsari Village only has an entertainment stage business for now. However for future plans, The Balongsari Village Government together with BUMDes want to develop Balongsari Village into a Tourism Village because of the tourism potential it has, namely the Rawagede Monument and Makom Jaka Tingkir and want to build partners with opak farmers in Balongsari Village. Not maximize, seen and the type of business that is still small and the lack of socialization to the community has made the BUMDes of Balongsari Village decrease in productivity and couple with the covid-19 pandemic which has made the entertainment stage as a type of business that BUMDes have currently does not work while the research method used in. This research is a qualitative method with this method, the researches obtained the results that the productivity of BUMDes in Balongsari Village has not been maximized and the management of BUMDes in Balongsari Village need to be improved again so that the type of BUMDes business increases and productivity is maximized.*

---

**Keywords:** Village Government Management, BUMDes, Productivity

---

**PENDAHULUAN**

Pemerintah desa dalam melakukan suatu pembangunan tentu harus memiliki sebuah manajemen yang baik terutama dalam pembangunan masyarakatnya. Masyarakat pedesaan pada umumnya masih memiliki keterbatasan dalam segi pengetahuan, sumber daya alam, dan

sumber daya pendanaan yang tentunya sangat membutuhkan kerjasama dengan pemerintah desa. Hubungan kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat yang baik akan berdampak terhadap pembangunan desa secara keseluruhan. Maka untuk memperoleh hasil pembangunan yang maksimal di perlukan

adanya proses perencanaan, perngorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Sistem manajemen sendiri merupakan kunci yang sangat diperlukan dalam pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah desa dalam menjalankan sebuah system manajemen harus dilandaskan dengan nilai keadilan untuk seluruh masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh haknya dengan merata.

Pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, pemerintah desa mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri yang meliputi urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Salah satu kepentingan masyarakat yang perlu di wujudkan yaitu kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan, desa memiliki salah satu fungsi yaitu melakukan pembangunan dan melaksanakan pembinaan perekonomian desa. Maka dari itu, desa memiliki lembaga yang bernama Badan Usaha Milik Desa yang berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. BUMDes sendiri mempunyai peran penting dalam meningkatkan dan mengembangkan usaha perekonomian masyarakat desa dengan dukungan dari aparat pemerintah desa di harapkan industry kecil menengah milik masyarakat dan potensi desa lainnya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat serta menjadi income untuk BUMDes sendiri.

Kabupaten Karawang secara keseluruhan memiliki 30 kecamatan dan 309 desa, salah satunya yaitu Desa Balongsari yang berlokasi di Kecamatan Rawamerta. Desa Balongsari merupakan

salah satu desa yang memiliki perekonomian yang tergolong menengah ke atas tetapi masih terdapat sebagian masyarakat yang memiliki perekonomian menengah ke bawah. Mayoritas masyarakat Desa Balongsari memiliki mata pencaharian sebagai petani dan buruh. Namun, walaupun perekonomian masyarakat Desa Balongsari tergolong baik tetapi minimnya minat masyarakat untuk membuka usaha sendiri dan bermitra dengan BUMDes membuat BUMDes Desa Balongsari belum berjalan dengan baik. Saat ini, Desa Balongsari hanya memiliki panggung hiburan yang biasanya pengelola BUMDes sewakan kepada masyarakat yang ingin melangsungkan acara. Tetapi karena adanya pembatasan pembuatan acara besar pada kondisi pandemic covid-19 saat ini, maka panggung hiburan pun tidak berjalan. Walaupun Desa Balongsari tidak memiliki usaha BUMDes selain panggung hiburan tetapi pemerintah desa sedang berusaha untuk menarik minat masyarakat untuk bermitra dengan BUMDes dan mengelola potensi wisata yang ada di desa.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Manajemen Pemerintahan**

Manajemen pemerintahan menurut Ramto (1997) adalah factor utama dalam suatu administrasi public (*public management*) untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan sarana dan prasarana yang ada, termasuk organisasi serta sumber dana dan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, manajemen pemerintahan tidak lain adalah factor upaya dalam suatu organisasi. Upaya tersebut diwujudkan dalam berbagai kegiatan pemerintah yang mencakup berbagai aspek kehidupan dan penghidupan Warga Negara dan masyarakatnya (Kristiadi, 1994).

Menurut Ndraha, Konsep dasar dari manajemen pemerintahan tidak lain adalah manajemen itu sendiri. Manajemen pada intinya menurut Ndraha adalah “bagaimana menciptakan *effectiveness* usaha (*doing right things*) secara *efficient* (*doing things*)

*right*) dan produktif, melalui fungsi dan skill tertentu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang telah ditetapkan.” Fungsi-fungsi manajemen pemerintahan menurut Taliziduhu Ndraha dalam bukunya yang berjudul *Kybernology* (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1 antara lain:

1. Perencanaan pemerintahan ; dilakukan untuk mengklarifikasi tujuan organisasi dan menyusun langkah-langkah guna mencapai tujuan (tujuan konkret dan terukur) organisasi.
2. Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan ; relisasi (implementasi) langkah-langkah tersebut memerlukan sumber daya, baik SDA, SDM, maupun SDB. Sebelum digunakan, sumber daya harus diorganisasikan agar siap pakai.
3. Penggunaan sumber-sumber pemerintahan; dilakukan untuk menggerakkan sumber-sumber pemerintahan agar mendapatkan hasil-hasil yang sudah ditetapkan.
4. Kontrol pemerintahan; dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara target pada perencanaan dengan hasil yang diperoleh dari penggunaan sumber-sumber pemerintahan tersebut.

Berdasarkan beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen pemerintahan adalah faktor utama dalam administrasi publik yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang bertujuan untuk mengatur berjalannya sistem pemerintahan desa

### **Pemerintahan Desa**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pasal 1 Ayat (2) menyatakan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada penjelasan selanjutnya Ayat (3) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (A.Mustanir dan Yasin, 2018).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang di pimpin oleh Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat desa yang memiliki tujuan memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat.

### **Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

BUMDes adalah bentuk badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui pernyertaan modal langsung yang berasal dari hasil kekayaan dan potensi desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa ( Undang-Undang No. 6 Tahun 2014). BUMDes juga dapat diartikan sebagai usaha yang bercirikan desa yang didirikan secara bersama-sama oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat desa. dimana badan usaha ini memiliki tugas untuk dapat mendayagunakan seluruh potensi ekonomi serta potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia dalam bingkay meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat desa ( Abdul Rahman, dkk, 2020 )

Berdasarkan beberapa teori diatas dapat dianalisis bahwa BUMDes adalah suatu bentuk badan usaha milik desa yang sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan dan potensi desa yang di kelola dan didirikan bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut I Made Laut Mertha Jaya di dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* pengertian penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan secara menyeluruh terhadap suatu objek. Peneliti menjadi instrumen utama dalam suatu penelitian kualitatif. Kemudian, hasil penelitian dijelaskan dalam bentuk kata-kata yang diperoleh melalui data valid. Sebab, penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi dan datanya tidak dapat diselesaikan dengan perhitungan statistic. Menurut Creswell (2007) penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian ilmiah yang lebih dimaksudkan untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan, melaporkan pandangan terperinci dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam setting yang alamiah tanpa adanya intervensi apa pun dari peneliti.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan observasi dan wawancara yang merupakan teknik yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui informan atau orang-orang yang berkaitan dengan topik penelitian.

Sumber data yang peneliti peroleh dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder yang peneliti dapatkan berasal dari buku dan jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung kepada pengumpul data. Data primer yang peneliti dapatkan berasal dari interaksi langsung dengan perangkat desa dengan metode wawancara dan observasi.

Analisis data menurut Sugiyono merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari

hasil wawancara, catatan, lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, Menyusun ke dalam pola, memilih yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Menurut sugiyono kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Lokasi penelitian yang peneliti ambil yaitu di Kantor Desa Balongsari, peneliti memilih lokasi ini karena Desa Balongsari memiliki hal yang menarik untuk diteliti, banyaknya potensi desa yang dimiliki sebenarnya dapat digali kembali untuk meningkatkan produktivitas BUMDes di Desa Balongsari.

Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan dari Bulan Maret 2022 dan diharapkan penelitian ini dapat terselesaikan dan memberikan manfaat bagi peneliti, aparat desa, dan masyarakat Desa Balongsari.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perencanaan Pemerintah Desa Balongsari Dalam Meningkatkan Produktivitas BUMDes**

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Balongsari, Beliau mengatakan “Desa Balongsari memiliki jenis usaha BUMDes yaitu panggung hiburan, tapi panggung tersebut tidak beroperasi saat ini karena adanya pandemic covid-19 dan untuk menambah jenis BUMDes saya berencana untuk membangun Desa Balongsari menjadi Desa Wisata karena Desa Balongsari memiliki tempat wisata Monumen Rawagede dan Makom Jakatingkir serta saya juga berencana untuk membangun mitra dengan pengrajin opak karena disini banyak pengrajin opak”. Maka berdasarkan informasi tersebut, dijelaskan bahwa sebelum terjadinya pandemi covid 19 Desa

Balongsari sudah memiliki jenis usaha BUMDes yang di kelola oleh BUMDes yaitu sebuah panggung hiburan. Namun, setelah datangnya pandemi covid19 usaha panggung hiburan ini tidak berjalan karena adanya pembatasan acara di masa pandemi. Oleh sebab itu, untuk saat ini perencanaan pemerintah desa terhadap pengelolaan BUMDes yaitu pemerintah Desa Balongsari akan menjadikan Desa Balongsari menjadi Desa Wisata.

Perencanaan pewujudan desa wisata ini dilandasi oleh potensi wisata yang dimiliki Desa Balongsari yaitu dengan adanya Monumen Rawagede dan Makom Jaka Tingkir, pemerintah desa ingin membangun mitra dengan pengelola tempat wisata tersebut yang kemudian dana akomodasi keuntungan yang diperoleh dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas BUMDes Desa Balongsari. Selain pengembangan desa wisata, Pemerintah Desa Balongsari bersama BUMDes juga memiliki perencanaan untuk melakukan mitra dengan pengrajin opak karena Desa Balongsari memiliki pengrajin opak yang cukup banyak tetapi sampai saat ini belum ada pengrajin opak yang bermitra dengan BUMDes. Pemerintah Desa Balongsari mengharapkan untuk kedepannya BUMDes dapat menjalin kerjasama mitra dengan pengrajin opak dan saling memberi keuntungan bagi kedua belah pihak.

#### **Pengorganisasian Pemerintah Desa Balongsari Dalam Upaya Meningkatkan Produktivitas BUMDes**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Balongsari, Beliau mengatakan Struktur Bumdes desa balongsari sudah terbentuk tetapi dalam pelaksanaan kegiatannya terhenti karena adanya pandemic covid-19. Panggung hiburan yang dijadikan sebagai pemasukan anggaran bumdes, saat ini tidak berjalan karena belum ada masyarakat yang menyewanya hal ini di akibatkan oleh adanya kebijakan PPKM dari pemerintah. Desa balongsari tidak memiliki usaha lain yang bermitra dengan bumdes selain

panggung hiburan. Tetapi untuk progam, ada satu progam yang sudah terlaksana sebelum adanya pandemi yaitu pembangunan jembatan desa”.

Maka berdasarkan informasi tersebut, pengorganisasian pemerintah desa dalam meningkatkan produktivitas BUMDes untuk saat ini sudah berjalan cukup baik. Struktur organisasi dan progam-progam kerjanya juga sudah terbentuk dengan baik dan sistematis, tetapi akibat adanya pandemic covid-19 banyak progam dan usaha yang terhambat pelaksanaannya. Namun, sebelum pandemi datang ada salah satu progam yang terlaksana yaitu pembangunan jembatan desa yang pendanaannya menggunakan anggaran BUMDes. Setelah pelaksanaan progam tersebut belum ada lagi progam yang terlaksana sampai saat ini, progam yang mulai di kerjakan yaitu pembangunan desa wisata yang terus di upayakan pemerintah desa untuk di kembangkan.

#### **Pelaksanaan Kegiatan yang Dilakukan Pemerintah Desa Balongsari Dalam Upaya Meningkatkan Produktivitas BUMDes**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Balongsari, Beliau mengatakan kegiatan BUMDes untuk saat ini sedang terhenti sementara karena adanya pandemic covid-19, anggaran BUMDes saat ini di fokuskan untuk penanganan pandemi covid-19 salah satunya progam vaksinasi”.

Berdasarkan informasi tersebut, pelaksanaan kegiatan BUMDes untuk saat ini sedang terhenti karena adanya pandemi covid-19. Pembatasan kegiatan dengan skala besar membuat panggung hiburan yang menjadi satu-satunya jenis usaha yang dimiliki BUMDes Desa Balongsari belum beroperasi kembali Sebagian dana yang berasal dari pemerintah pusat dialokasikan untuk kegiatan penanganan pandemi covid-19 salah satunya yaitu kegiatan vaksinasi. Untuk saat ini, pemerintah desa sedang sibuk mengurus kegiatan vaksinasi untuk anak-anak sekolah dasar

Namun, Pemerintah Desa Balongsari bersama BUMDes sedang berupaya untuk menghidupkan kembali pelaksanaan kegiatan BUMDes di Desa Balongsari dengan menjadikan Desa Balongsari menjadi desa wisata dan berupaya untuk membangun mitra dengan pengusaha-pengusaha UMKM yang terdapat di Desa Balongsari. Untuk memulihkan kembali pelaksanaan kegiatan BUMDes di Desa Balongsari tidak mudah diperlukan tekad yang kuat dan kerjasama yang baik antara Pemerintah Desa, Organisasi BUMDes, Tokoh-tokoh masyarakat setempat dan masyarakat Balongsari sendiri. Pemerintah Desa Balongsari pun sudah membuat peraturan desa mengenai pembentukan dan pengelolaan BUMDes yaitu tercantum dalam Peraturan Desa Balongsari Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang Nomor : 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDES) dalam peraturan tersebut dijelaskan tugas dan wewenang pengurus BUMDes, permodalan serta tata cara pengelolaan BUMDes, salah satunya tercantum dalam pasal 14 ayat (1) menjelaskan tentang sumber permodalan yang didapatkan BUMDes berasal dari bantuan APBD Kabupaten, bantuan dari APBD Provinsi, bantuan dari APBN, bantuan atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. Semoga dengan peraturan desa yang sudah terbentuk dapat di jalankan dengan maksimal supaya pelaksanaan BUMDes Desa Balongsari kembali produktif.

Berikut adalah daftar jenis usaha yang pernah berjalan di Balongsari

Tabel 1. daftar jenis usaha yang pernah berjalan di Balongsari

No	Jenis Usaha
1	Simpan pinjam
2	Peternakan
3	Tabung Gas
4	Panggung hiburan

### **Pengawasan Pelaksanaan BUMDes di Desa Balongsari**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Balongsari, Beliau mengatakan “ pengawasan yang dilakukan pemerintah desa bersama BUMDes yaitu kami setiap bulan atau tiga bulan sekali melakukan pelaporan anggaran bumdes terhadap pemerintah dan adapun hambatan yang di alami yaitu pelaksanaan progam banyak yang terhenti karena pandemi panggung hiburan tidak berjalan sebab PPKM, kurangnya minat masyarakat menciptakan lapangan usaha sendiri dan masih kurangnya sosialisasi oleh organisasi BUMDes kepada masyarakat sehingga masyarakat kurang mengetahui informasi tentang BUMDes.”

Berdasarkan informasi tersebut, dijelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan BUMDes yaitu pemerintah desa Bersama BUMDes melakukan pelaporan anggaran BUMDes setiap bulan atau tiga bulan sekali dan melakukan evaluasi terhadap anggaran yang telah dipakai. Adapun hambatan yang dialami pelaksanaan BUMDes Desa Balongsari yaitu dengan adanya pandemi covid-19 pelaksanaan progam terhenti sementara terutama dalam jenis usaha panggung hiburan. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh pemerintah, tentunya sangat berdampak terhadap jenis usaha panggung hiburan ini, tingkat penyewaan panggung oleh masyarakat mengalami penurunan drastis, terakhir kali penyewaan dilakukan pada saat perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di tanah lapang Desa Balongsari. Selain adanya pandemi covid-19, hambatan lain yang mempengaruhi produktivitas BUMDes Desa Balongsari yaitu masih kurangnya minat masyarakat dalam menciptakan usaha sendiri. Hal ini disebabkan karena rata-rata masyarakat Desa Balongsari sudah memiliki mata pencaharian lain sebagai petani dan buruh dan tingkat perekonomian masyarakatnya pun terbilang sudah menengah ke atas.

Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BUMDes juga menjadi salah satu hambatan dalam peningkatan produktivitas BUMDes karena masyarakat menjadi kurang mengetahui informasi mengenai tata cara dan persyaratan untuk dapat bermitra dengan BUMDes, dan alur pemanfaatan dana BUMDes untuk mengembangkan usaha mereka. Kurangnya sosialisasi oleh pihak BUMDes sendiri diakibatkan karena kesibukan yang dimiliki masing-masing pengurus BUMDes sehingga mereka belum sempat untuk memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat. Sebab untuk saat ini pemerintah desa bersama dengan BUMDes masih memfokuskan anggaran untuk penanganan kasus covid-19 di Desa Balongsari.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Pemerintah Desa Balongsari berencana untuk meningkatkan produktivitas BUMDes dengan menggali potensi wisata yaitu melakukan pengembangan desa wisata yang di fokuskan kepada Monumen Rawagede dan Makom Jaka Tingkir. Kemudian, perencanaan melakukan mitra dengan pengrajin opak yang ada di Desa Balongsari.

Pengorganisasian BUMDes Desa Balongsari untuk saat ini sudah terbilang cukup baik karena sudah memiliki struktur organisasi dan program-program yang sistematis. Hanya saja program-program yang telah dibentuk pelaksanaannya terhenti sementara karena adanya covid-19.

Panggung hiburan yang menjadi saat ini menjadi satu-satunya usaha yang dimiliki BUMDes Desa Balongsari pemanfaatannya terhenti akibat adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh pemerintah yang tidak memperbolehkan masyarakat untuk mengadakan acara-acara besar.

Pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan BUMDes yaitu pemerintah desa Bersama BUMDes

melakukan pelaporan anggaran BUMDes setiap bulan atau tiga bulan sekali dan melakukan evaluasi terhadap anggaran yang telah dipakai. Adapun hambatan yang dialami diantaranya yaitu program-program yang telah disusun harus terhenti sementara karena pandemic covid-19, kurangnya minat masyarakat untuk menciptakan usaha, kurangnya sosialisasi dari pihak BUMDes untuk masyarakat sehingga informasi terkait pemanfaatan BUMDes kurang tersampaikan.

### **Saran**

Pemerintah Desa Balongsari bersama BUMDes diharapkan dapat memaksimalkan kembali sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan dana BUMDes dan prosedur persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat untuk pengembangan UMKM yang di miliki masyarakat

Pemerintah desa bersama BUMDes diharapkan dapat memaksimalkan kembali perencanaan untuk pembangunan desa wisata dengan objek wisata Monumen Rawagede dan Makom Jaka Tingkir serta dapat segera membangun mitra dengan pengrajin opak supaya dapat meningkatkan kembali produktivitas BUMDes Desa Balongsari

Pemerintah Desa bersama BUMDes diharapkan dapat menggali kembali potensi yang ada di Desa Balongsari supaya dapat menambah jenis usaha BUMDes selain adanya panggung hiburan

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Rahman Suleman, E. R. (2020). BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Ahmad Mustanir, K. S. (2018). Peran Aparatur Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Tonrongnge Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang. Jurnal Ilmiah Clean Government Volume 2.

- Dian Cita Sari, R. T. (2020). Manajemen Pemerintahan. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Heri Saputra, S. J. (2021). Manajemen Pemerintahan Desa Dalam Mencapai Keunggulan Potensial dan Berdaya Saing. Jurnal Loyalitas Kreativitas Abdi Masyarakat Kreatif Volume 02.
- Jaya, I. M. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif . Yogyakarta: Quadrant.
- Ndraha, T. (2003). Kybernology ( Ilmu Pemerintahan Baru ) Jilid 1. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudaryono. (2019). Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Mix Method. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Desa Balongsari Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang Nomor: 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDES). Dokumen Pemerintah Desa Balongsari